

LAPORAN HASIL EVALUASI



Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun
Anggaran 2022

PW.02.01/448/Inspt-Drban 1/2023

31 Maret **2023**



INSPEKTORAT DAERAH

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : Pw.02.01 / 448 / Inspt - Irban 1 / 2023
Tanggal : 31 Maret 2023

Ikhtisar Eksekutif

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 telah diimplementasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta dengan hasil evaluasi sebesar **91,00 (Sembilan Puluh Satu Koma Nol Nol) (AA)**. Adapun rincian nilai pada komponen Perencanaan Kinerja yaitu sebesar 30,00 (Tiga Puluh Koma Nol Nol), Pengukuran Kinerja sebesar 25,50 (Dua Puluh Lima Koma Lima Puluh), Pelaporan Kinerja sebesar 15,00 (Lima Belas Koma Nol Nol), Evaluasi Internal sebesar 20,50 (Dua puluh Koma Lima Puluh).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2022 adalah **Sangat Memuaskan**. Rekomendasi terhadap beberapa kelemahan diberikan sebagai bahan perbaikan implementasi SAKIP tahun berikutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi sakip adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor:700/Kep.454-Inspektorat/2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Surat Perintah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: PW.02.01/310/Insp/2023 Tanggal 28 Februari 2023 Tentang Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Pada Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Tegalwaru, dan Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta.

b. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

c. Tujuan Evaluasi:

1. Memperoleh Informasi tentang implementasi SAKIP ;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP ;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindakan rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam Evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Adapun Teknik Evaluasi AKIP yang digunakan adalah Checklist Pengumpulan Data dan Informasi, Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana serta Studi Dokumentasi.

f. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta telah dilakukan dengan melakukan kegiatan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan strategis lima tahunan (Renstra 2018-2023) yang dijabarkan dengan perencanaan operasional tahunan, dimana pada tahun 2022 telah disusun Rencana Kerja Tahun 2022. Indikator keberhasilan kinerja beserta targetnya telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selanjutnya untuk Indikator tahunan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) atau Tapkin 2022 antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Purwakarta dengan Bupati Purwakarta. Sejalan dengan terpilihnya kepala daerah, dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja (PK). Cascading perjanjian kinerja telah dibuat sampai dengan eselon 4 dan telah ditetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan kinerja secara berjenjang sesuai tupoksi struktural untuk pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya sebagai langkah aksi pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Aksi Kinerja. Pada akhir tahun anggaran 2022, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 2022 yang disertai pengukuran kinerja sebagai dokumen pertanggungjawaban.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Tahun Sebelumnya

Perbaikan atas rekomendasi temuan evaluasi SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta tahun sebelumnya (2021) telah dilakukan perbaikan.

BAB II

HASIL EVALUASI

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mendapatkan nilai 30,00 (100,00 % dari bobot 30%), di komponen ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah kabupaten Purwakarta mempunyai inovasi, berupa :

- Kamus kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, kamus usulan musrenbang serta kamus pikir usulan dari masyarakat, kamus ini sangat bermanfaat sebagai salah satu bahan dalam penyusunan dokumen perencanaan di Kabupaten Purwakarta, dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten;
- Sistem Informasi digital (aplikasi) penginputan data perencanaan dan penganggaran untuk menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, PD, KUA PPAS, APBD, RKA-SKPD, DPA-SKPD), dan Pengusulan Musrenbang, Hibah dan Bansos (<https://sipd.kemendagri.go.id>);
- Sistem Informasi digital (aplikasi) Aplikasi penginputan data perencanaan dan realisasi kinerja pembangunan untuk penilaian LPPD (<https://elppd.kemendagri.go.id>);
- Sistem Informasi digital (aplikasi) penginputan perencanaan dan realisasi kinerja pembangunan untuk pelaporan SPM (<https://spm.bangda.kemendagri.go.id>);
- Sistem Informasi digital (aplikasi) penginputan data perencanaan dan realisasi kinerja pembangunan untuk penilaian SPIP (<https://splptIntegrasi.bpkp.go.id>);
- Sistem Informasi digital (aplikasi) Media online penyampaian dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD dan RKPD) (<https://bit.ly/rpjmd-dan-rkpd-ka-purwakarta>);
- Sistem Informasi digital (aplikasi) Media online penyampaian dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (RENSTRA PD dan RENJA PD) ([https://bit.ly/penyampaian-renstra-dan renja-pd](https://bit.ly/penyampaian-renstra-dan-renja-pd));
- Sistem Informasi digital (aplikasi) Aplikasi penginputan data perencanaan untuk menyusun dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD, RENJA PD), dan pengusulan Musrenbang, Pokir (<https://sipd.go.id>).

Selain mempunyai inovasi, juga Bappedalitbangda Kabupaten Purwakarta mendapatkan prestasi dalam event Kota/Kabupaten terbaik PPD terkait dengan perencanaan kinerja, yaitu mendapatkan peringkat terbaik ke 4 dari 28 Kota/Kabupaten terinovatif dalam aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2021 tingkat Provinsi Jawa Barat.

Adapun hasil evaluasi atas perencanaan kinerja yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

a. Dokumen Perencanaan kinerja tersedia

Sub komponen ini memiliki nilai 6,00 dari bobot nilai 6,00, presentase kriteria yang terpenuhi sebesar 100 % dengan predikat AA, dimana telah tersedianya dokumen berupa SOP terkait pedoman teknis perencanaan kinerja, RPJPD Kabupaten Purwakarta, Renstra Perubahan 2008-2013, Renja Perubahan 2022, Rencana Aksi 2022, serta RKA Perubahan 2022.

b. Dokumen Perencanaan kinerja memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)

Sub komponen ini memiliki nilai 9,00 dari bobot nilai 9,00, presentase kriteria yang terpenuhi sebesar 100 % dengan predikat AA, ini bisa dilihat dari kriteria :

- Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan, ini bisa dilihat dari adanya Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 137 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, serta Rencana Kerja (RENJA) Bappedalitbangda Tahun 2022;
- Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu, dimana dokumen – dokumen tersebut telah di upload di Web resminya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta, yaitu berupa screenshot publikasi dokumen Cascading Kinerja 2022, publikasi LAKIP 2022, Publikasi Renstra Murni dan Perubahan 2018-2023, publikasi Renja, publikasi dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) 2018-2023, di Website Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, ini tertuang di dalam

Renstra Perubahan Bab VI "rencana program dan kegiatan serta pendanaan", serta Renja perubahan BAB III "rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;

- Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, hal ini tertuang di dalam Renstra Perubahan BAB IV "Tujuan dan Sasaran";
- Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART, ini bisa terlihat di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis, ini dapat dilihat dari dokumen IKU, serta LAKIP BAB III;
- Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading), ini bisa terlihat di RPJMD, Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja dan Cascading Kinerja;
- Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) dan Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja, ini bisa terlihat di Perjanjian Kinerja dan Cascading Kinerja;
- Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja, hal ini tertuang di dalam Indikator Kinerja Individu (IKI), dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang Berkesinambungan

Sub komponen ini memiliki nilai 15,00 dari bobot nilai 15,00, presentase kriteria yang terpenuhi sebesar 100 % dengan predikat AA, ini bisa dilihat dari kriteria :

- Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai, ini bisa dilihat dari Renstra Perubahan, Renja, RKA Perubahan;
- Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai, ini terlihat dari Rencana Aksi Kinerja, Laporan Realisasi Rencana Aksi Kinerja;
- Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track, ini tertuang di dalam Laporan Realisasi Rencana Aksi Kinerja;

- Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala, ini bisa terlihat dari Monev Rencana Aksi;
- Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya, serta perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik, ini terlihat dari dokumen Tindak Lanjut Monev Rencana Aksi;
- Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, ini tertuang di dalam Perjanjian Kinerja, Cascading Kinerja, Rencana Aksi;
- Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, ini tertuang di dalam Indikator Kinerja Individu, SKP.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas Pengukuran Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 25,50 (85 % dari bobot 30 %), di komponen ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah kabupaten Purwakarta mempunyai inovasi, berupa :

- Sistem Informasi digital (aplikasi) penginputan data perencanaan dan realisasi kinerja pembangunan untuk penilaian LPPD (<https://elppd.kemendagri.go.id>);
- Sistem Informasi digital (aplikasi) penginputan perencanaan dan realisasi kinerja pembangunan untuk pelaporan SPM (<https://spm.bangda.kemendagri.go.id>);
- Sistem Informasi digital (aplikasi) penginputan data perencanaan dan realisasi kinerja pembangunan untuk penilaian SPIP (<https://spipterintegrasi.bpkp.go.id>);
- Sistem Informasi digital (aplikasi) penginputan data realisasi kinerja pembangunan (program, kegiatan dan subkegiatan) Perangkat Daerah (<https://sip.purwakartakab.go.id>);
- Sistem Informasi digital (aplikasi) Media online penginputan realisasi kinerja program pembangunan tiap triwulan untuk penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2022 (<https://tinyurl.com/laporan-triwulanan-22>);
- Sistem Informasi digital (aplikasi) Media online penginputan realiasi kinerja pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik tiap triwulan untuk penyampaian laporan pelaksanaan DAK Fisik

- (<https://tinyurl.com/laporan-dak-fisk-2022>);
- Sistem Informasi digital (aplikasi) Media online penginputan realiasi kinerja pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK Non Fisik tiap triwulan untuk penyampaian laporan pelaksanaan DAK Non Fisik (<https://tinyurl.com/laporan-dak-nonfisk-2022>);
 - Sistem Informasi digital (aplikasi) Media online penginputan realisasi kinerja program pembangunan tiap triwulan untuk penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2023 (<https://tinyurl.com/laporan-monev-2023>).

Selain mempunyai inovasi, juga Bappedalitbangda Kabupaten Purwakarta mendapatkan prestasi dalam event Kota/Kabupaten terbaik PPD terkait dengan pengukuran kinerja, yaitu mendapatkan peringkat terbaik ke 4 dari 28 Kota/Kabupaten terinovatif dalam aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2021 tingkat Provinsi Jawa Barat.

adapun hasil evaluasi atas pengukuran kinerja yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan

Sub komponen ini memiliki nilai 6,00 dari bobot nilai 6,00, presentase kriteria yang terpenuhi sebesar 100 % dengan predikat AA, ini bisa dilihat dari krireria :

- Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, serta adanya mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan, ini bisa terlihat dari adanya SOP No800/399/PPE-Bappelitbangda/XII/2021 tentang Penyusunan RKPD, SOP No.800/400/PPE-Bappelitbangda/XII/2021 Penyusunan RPJMD, SOP Penyusunan dan Perumusan Rencana Strategis No.800/386/Sekret-Bappelitbangda/XII/2020, SOP Penyusunan dan Perumusan Rencana Kerja PD, SOP penyusunan LKPj/LPPD, SOP penyusunan evaluasi kinerja internal;
- Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, ini bisa di lihat dari dokumen IKU, Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja.

b. Pengukuran Kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

Sub komponen ini memiliki nilai 9,00 dari bobot nilai 9,00, presentase kriteria yang terpenuhi sebesar 100 % dengan predikat AA, ini bisa dilihat dari krireria :

- Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian, Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan, Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala, Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang, hal tersebut dapat dilihat dari dokumen Nota Dinas Hasil Rapat Monev pelaksanaan program dan kegiatan TW 1- 4 TA 2022;
- Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi), serta Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi), ini dapat dilihat dari SIPD dan SIP.

c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

Sub komponen ini memiliki nilai 10,50 dari bobot nilai 15,00, presentase kriteria yang terpenuhi sebesar 80 % dengan predikat B; ini bisa dilihat dari krireria :

- Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, ini terlihat dari adanya dokumen Perbup No 275 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja, telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja, ini dapat dilihat dari dokumen IKU, Penetapan Kinerja, Renstra BAB V, LAKIP BAB III;
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja, ini dapat dilihat di dalam dokumen Renja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, LAKIP BAB III;
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja, hal ini dapat terlihat di dalam dokumen RKA Perubahan;
- Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, hal ini tertuang di dalam dokumen LAKIP BAB III;
- Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, hal ini tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Realisasi Rencana Aksi, Monev Rencana Aksi;
- Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, ini dapat dilihat di dalam dokumen Perjanjian Kinerja, IKI, Rencana Aksi, Laporan Realisasi Rencana Aksi, Monev Rencana Aksi, SKP.

Akan tetapi ada masih terdapat **kelemahan** di dalam komponen pengukuran kinerja, yaitu :

- Pengukuran Kinerja belum bisa menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional;
- Pengukuran kinerja belum bisa mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.

Atas kelemahan tersebut **direkomendasikan** agar:

- Melakukan koordinasi dengan BKPSDM Kabupaten Purwakarta terkait dengan Pengukuran Kinerja bisa menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional;
- Melakukan koordinasi dengan bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Purwakarta terkait dengan Pengukuran kinerja bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam penyesuaian (Refocusing) Organisasi.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas Pelaporan Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 15,00 (100 % dari bobot 15 %), di komponen ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah kabupaten Purwakarta mempunyai inovasi, berupa :

- Sistem Informasi digital (aplikasi) Aplikasi penginputan data perencanaan dan realisasi kinerja pembangunan untuk penilaian LPPD (<https://elppd.kemendagri.go.id>);
- Sistem Informasi digital (aplikasi) penginputan perencanaan dan realisasi kinerja pembangunan untuk pelaporan SPM (<https://spm.bangda.kemendagri.go.id>);
- Sistem Informasi digital (aplikasi) penginputan data perencanaan dan realisasi kinerja pembangunan untuk penilaian SPIP (<https://spipterintegrasi.bpkp.go.id>);
- Sistem Informasi digital (aplikasi) Media online penginputan realisasi kinerja program pembangunan tiap triwulan untuk penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2022 (<https://tinyurl.com/laporan-triwulanan-22>);
- Sistem Informasi digital (aplikasi) Media online penginputan realiasi kinerja pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik tiap triwulan untuk penyampaian laporan pelaksanaan DAK Fisik

(<https://tinyurl.com/laporan-dak-fisk-2022>);

- Sistem Informasi digital (aplikasi)Media online penginputan data survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh semua Perangkat Daerah kepada penerima layanan untuk menyusun Laporan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (<https://tinyurl.com/skm-kabpurwakarta>)
- Sistem Informasi digital (aplikasi)Media online pengolahan data survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik untuk melihat hasil capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tiap Perangkat Daerah (<https://tinyurl.com/hasi-skm-kabpurwakarta>).

Selain mempunyai inovasi, juga Bappedalitbangda Kabupaten Purwakarta mendapatkan prestasi dalam event Kota/Kabupaten terbaik PPD terkait dengan pelaporan kinerja, yaitu mendapatkan peringkat terbaik ke 4 dari 28 Kota/Kabupaten terinovatif dalam aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2021 tingkat Provinsi Jawa Barat.

Adapun hasil evaluasi atas pelaporan kinerja yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja

Sub komponen ini memiliki nilai 3,00 dari bobot nilai 3,00, presentase kriteria yang terpenuhi sebesar 100 % dengan predikat AA, ini bisa dilihat dari kriteria :

- Dokumen Laporan Kinerja telah disusun, dan disusun secara berkala, serta telah diformalkan ini dapat dilihat dari adanya dokumen LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2022;
- Dokumen Laporan Kinerja telah direviu, hal ini dapat dilihat dari dokumen Nota Dinas Rapat Pembahasan Penyusunan LAKIP Tahun 2022;
- Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu, LAKIP disampaikan di bulan Februari 2023.

b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya

Sub komponen ini memiliki nilai 4,50 dari bobot nilai 4,50, presentase kriteria yang terpenuhi sebesar 100 % dengan predikat AA, ini bisa dilihat dari kriteria :

- Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, hal ini tertuang didalam dokumen Surat Edaran Sekda No.Pr.10.06/183/org tgl 13 januari 2022 tentang Lakip tahun 2021;
- Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka Menengah, Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja), Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.hal ini tertuang di dalam LAKIP BAB III;
- Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja), hal ini tertuang didalam LAKIP BAB III dan BAB IV.

c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

Sub komponen ini memiliki nilai 7,50 dari bobot nilai 7,50, presentase kriteria yang terpenuhi sebesar 100 % dengan predikat AA, ini bisa dilihat dari krireria :

- Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab), hal ini dapat dilihat dari dokumen LAKIP yang telah diformalkan;
- Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai, hal ini dapat dilihat dari dokumen LAKIP, Nota Dinas Pembahasan penyusunan Lakip;
- Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, serta Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, hal ini dapat terlihat dari dokumen Laporan Realisasi Rencana Aksi, nota dinas monev Pelaksanaan realisasi Program, Kegiatan, sub kegiatan;
- Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya, hal ini dapat dilihat dari dokumen Renja BAB II 2022;
- Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi, hal ini dapat dilihat dari dokumen LAKIP BAB III.

4. Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas Pengukuran Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 20,50 (82 % dari bobot 25 %), adapun hasil evaluasi atas pengukuran kinerja yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

Sub komponen ini memiliki nilai 4,00 dari bobot nilai 5,00, presentase kriteria yang terpenuhi sebesar 100 % dengan predikat BB, ini bisa dilihat dari kriteria :

- Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, hal ini dapat dilihat dari dokumen SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang, hal ini dapat dilihat dari dokumen Surat Perintah Tugas Evaluasi SAKIP OPD.

b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

Sub komponen ini memiliki nilai 5,25 dari bobot nilai 7,50, presentase kriteria yang terpenuhi sebesar 80 % dengan predikat B, ini bisa dilihat dari kriteria :

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar, yaitu Permenpan No 88 Tahun 2021, SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai, hal ini dapat terlihat dari kegiatan Pola Pengembangan Mandiri (PPM) SAKIP;
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai, hal ini tertuang didalam dokumen PKE SAKIP OPD, LKE SAKIP OPD;
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah, hal ini dapat terlihat dari dokumen Surat Perintah Tugas Evaluasi SAKIP OPD PKE SAKIP OPD, LKE SAKIP OPD;

Akan tetapi masih ada **kelemahan** yaitu terkait Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Atas kelemahan tersebut **direkomendasikan** agar:

Melakukan koordinasi dengan Diskominfo Kabupaten Purwakarta untuk membangun suatu sistem aplikasi agar pelaksanaan evaluasi akuntabilitas Kinerja menggunakan teknologi Informasi.

c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

Sub komponen ini memiliki nilai 11,25 dari bobot nilai 12,50, presentase kriteria yang terpenuhi sebesar 100 % dengan predikat **A**, ini bisa dilihat dari kriteria :

- Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti ;
- Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal;
- Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan Akuntabilitas kinerja;
- Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja;
- Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Yang dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Tindak lanjut yang ditandatangani oleh Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta dan terpenuhinya dokumen serta implementasi komponen dan sub komponen SAKIP.

BAB III PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi sistem AKIP sebagai bahan peningkatan manajemen kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta.



INSPEKTUR

Is. H. Nurhidayat, M.M.
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19640515 199203 1 008